



Kebijakan Politis Presiden Soeharto untuk Melanggengkan Kekuasaannya

Abstract

Indonesia is a democratic country that highly values the interests of its people. Therefore, authoritarian actions and absolute power by a leader do not show democratic values. Nevertheless, Indonesia has been recorded in its history to be led by an authoritarian and long-standing president, President Soekarno and President Suharto. Suharto was in power the longest between the two presidents, approximately 30 years (1968-1998). One of Suharto's leadership hallmarks that distinguished him from other presidential leaderships was the formation of the ABRI Dwi Function doctrine. With the Dwi Function ABRI formation, Suharto intended to make it his prominent supporter in politics. The application of the dual function of ABRI has another motive to strengthen Suharto's power during his presidency by making the party with the tremendous potential to overthrow him be subtly removed or made into an ally, namely the military. The policies to maintain his power, among others, were realized by giving the post of general to someone who was not capable, purging leftists (PKI), restricting the press, acting harshly on demonstrators, and attracting the sympathy of the Islamic group to be used.

Keyword: *The Power of President Soeharto, Dual Function, Army, and Political Policy.*

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat mengagungkan kepentingan rakyatnya. Oleh sebab itu tindakan otoriter dan berkuasa mutlak oleh seorang pemimpin sangat tidak menunjukkan nilai-nilai demokrasi. Walaupun demikian, Indonesia pernah tercatat dalam sejarahnya dipimpin oleh seorang presiden yang otoriter dan berkuasa lama, yakni presiden Soekarno dan presiden Soeharto. Diantara kedua presiden tersebut, Soeharto yang berkuasa paling lama dengan waktu lebih kurang 30 tahun (1968-1998). Salah satu ciri khas dari kepemimpinan Soeharto yang membedakannya dengan kepemimpinan presiden lainnya adalah pembentukan doktrin Dwi Fungsi ABRI. Dengan pembentukan Dwi Fungsi ABRI, Soeharto berniat menjadikannya sebagai pendukung utamanya dalam berpolitik. Penerapan Dwi Fungsi ABRI memiliki motif lain sehingga dapat memperkokoh kekuasaan Soeharto selama menjadi presiden dengan menjadikan pihak yang akan berpotensi besar melengserkannya dapat disingkirkan secara halus atau dijadikan sekutu, yaitu pihak militer. Adapun kebijakan-kebijakan sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya tersebut antara lain diwujudkan dengan memberi jabatan jenderal kepada seseorang yang tidak cakap, membersihkan penganut paham kiri (PKI), membatasi pers, bertindak kasar terhadap para demonstran, dan menarik simpati golongan Islam untuk diperalat.

Kata kunci: Kekuasaan Presiden Soeharto, Dwi Fungsi, Tentara, dan Kebijakan Politik.

Oleh:

Jamrud Qomaruz Zaman

Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa UIN Malang
Jamrudzaman1@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada akhir-akhir ini muncul wacana di beberapa media sosial bahwa presiden Jokowi akan menjabat selama tiga periode. Tentu hal ini menimbulkan berita yang menghebohkan penduduk Indonesia, terutama generasi yang pernah mengalami masa kepemimpinan orde baru atau masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Presiden kedua RI. Menanggapi beredarnya isu tiga periode tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2024 mendatang atau tidak mencalonkan diri untuk tiga periode. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa ia tidak akan pernah melanggar UUD 1945 yang telah diamanatkan sebagaimana didalamnya mengatur bahwa Presiden hanya boleh menjabat dua periode saja.¹

Menurut Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara, bahwa kepemimpinan Presiden selama tiga periode atau lebih akan berdampak negatif bagi negeri. Diantara dampak negatif tersebut yaitu adanya penyelewengan terhadap kekuasaan. Bivitri menambahkan bahwa yang bertindak sewenang-wenang bukanlah sang Presiden saja, akan tetapi juga kroni-kroninya. Selain itu dampak negatif selanjutnya ialah regenerasi kepemimpinan akan terhambat. Bivitri menjelaskan pula bahwa negeri Indonesia ini

mempunyai calon-calon pemimpin negeri yang sangat potensial, maka akan sangat rugi tatkala negeri ini hanya mempertahankan para pemimpin lama.

Terkait kepemimpinan Presiden selama tiga periode atau lebih pasti akan mengingatkan pada masa Orde Baru. Pada masa itu Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998). Pada masa kepemimpinan yang begitu lama tersebut banyak terjadi pergolakan-pergolakan terutama pada masa paruh akhir. Hal ini dipicu oleh adanya korupsi, kolusi, nepotisme, terbatasnya pers, iklim politik yang buruk, hingga pada puncaknya terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Krisis moneter tersebut mengakhiri pemerintahan Presiden Soeharto yang begitu langgeng dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang dengan terang-terangan turun tangan dan berani berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Oleh karena itu, mengupas kembali sejarah Orde Baru, perjalanan Soeharto menuju kepemimpinan, dan mendalami kebijakan-kebijakan politiknya demi kelanggengan kekuasaannya sangat urgent dilakukan agar masyarakat Indonesia sekali-kali tidak meninggalkan sejarahnya dan dapat dievaluasi supaya tidak jatuh pada lubang yang sama.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini ialah metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu metode yang dilakukan

1 "Jokowi Tolak Amandemen Jabatan Presiden 3 Periode," diakses 25 September 2019, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/jokowi-tolak-amandemen-jabatan-presiden-3-periode/1661041>.

untuk mempelajari, mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan fakta-fakta sejarah yang berbentuk buku sejarah dan beberapa jurnal penelitian. Adapun tahapan metode sejarah ini ada empat, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

C. Pembahasan

1. Peran Soeharto Pada Masa Orde Lama dan Naiknya Menuju Singgasana

Soeharto merupakan seorang Presiden sekaligus pejuang militer atau TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Jenderal bintang lima.² Soeharto mempunyai segudang prestasi sewaktu menjadi pejuang militer pada masa orde lama (kepemimpinan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno). Diantara prestasi Soeharto yang terkenal pada masa orde lama ialah menjadi Panglima Mandala dalam misi pembebasan Irian Barat yang

saat itu diduduki Belanda.³ Selain itu ia juga mempunyai peran sentral dalam penumpasan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mencoba mengambil alih kedaulatan RI dengan jalan kudeta. Jenis konflik yang terjadi antara Pemerintah RI dengan kubu PKI waktu itu dalam ilmu Politik disebut dengan konflik negatif.⁴ Pada waktu setelah terjadinya peristiwa pembantaian Jenderal oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965, Soeharto langsung mengambil alih jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dari Perwira Angkatan Darat yang telah dibantai oleh PKI tersebut.⁵

Perlu diketahui sebelumnya bahwa pada saat Jenderal Soeharto menduduki jabatan sebagai Pangkostrad tersebut, ia masih belum mengetahui dalang dibalik pembantaian para Jenderal pada waktu menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1945 tersebut. Namun akhirnya pelaku pembantaian tersebut diketahui setelah datangnya informasi yang diperoleh dari Jenderal Yoga Sugomo yang merupakan Kepala Intel Kostrad pada waktu gerakan pembantaian tersebut. Jenderal Yoga Sugomo mencoba meyakinkan Jenderal Soeharto dengan analisisnya bahwa yang berada dibalik aksi pembantaian itu ialah PKI. Jenderal Yoga Sugomo kemudian

2 Jenderal TNI di Indonesia yang mempunyai pangkat jenderal bintang lima hanya ada tiga yaitu Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Pengangkatan ketiga Jenderal tersebut pada jabatan Jenderal bintang lima terjadi pada tahun 1997. Alasan dilakukan pemberian jenderal bintang lima tersebut adalah karena ketiganya merupakan tokoh penting dari kekuatan politik tentara, dalam konteks ini Jenderal Besar Sudirman disebut sebagai peletak dasar dari peran politik tentara, Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai perumus peran politik tentara dengan gagasan jalan tengahnya yang terkenal, dan Jenderal Soeharto sebagai pelaku yang menerapkan peran politik tentara demi memakmurkan dan memajukan NKRI ini, lihat Salim Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*, ed. oleh Opik Lubis, 1 ed. (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2013).

3 Said.

4 Leo Agustino, *Pengantar Ilmu Politik*, ed. oleh Kamilia Sukmawati, 1 ed. (Malang: Intrans Publishing, 20220).

5 Salim Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*, ed. oleh Ibnu Maxum, 1 ed. (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2016).

makin merasa mantap dan yakin setelah mendengar siaran radio bahwa yang melakukan pembantaian para Jendral ialah Letnan Kolonel (Letkol) Untung. Untung merupakan salah satu teman Yoga Sugomo yang ia kenal sewaktu penumpasan PRRI Permesta dan Yoga mengetahui bahwa ia merupakan salah satu Perwira TNI yang berhaluan kiri. Kemudian Jendral Soeharto segera mengambil tindakan dengan memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi penumpasan PKI tersebut.⁶

Operasi pembersihan PKI dari tubuh NKRI oleh Soeharto tidak hanya dilakukan di kawasan Jakarta saja, melainkan meliputi seluruh daerah-daerah Indonesia terutama Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sebelumnya teror dalam bentuk bentrok fisik oleh PKI tidak hanya dilakukan di daerah sekitar Jakarta saja, melainkan juga di beberapa daerah di Indonesia. Banyak masyarakat dari kalangan kaum Marhaenis dan santri yang menjadi korban penaniayaan bahkan pembantaian oleh PKI. Sebagai contoh penganiayaan dan pembantaian di daerah luar Jakarta ialah peristiwa penyerangan PKI terhadap kader-kader Pemuda Islam Indonesia (PII) pada saat pelatihan di Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Selain melakukan penganiayaan, ternyata PKI juga melakukan penistaan agama dengan membakar kitab-kitab suci Al-Qur'an. Perbuatan PKI

tersebut memicu kemarahan para santri dan kiai di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga konon kabarnya dikemudian hari mereka ini banyak memainkan peran dalam menumpas PKI bersama TNI yang bersih dari pengaruh PKI.⁷

Pembersihan oleh Jenderal Soeharto terhadap pendukung dan penggerak PKI ini sampai pada puncaknya dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia setelah ia menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dan pemegang Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar pada tahun 1966. Pada waktu itu Soeharto benar-benar telah benci dan merasa dikhianati oleh PKI hingga akhirnya dibubarkannya. Kebencian Soeharto terhadap PKI ini dibuktikan oleh Menteri Oei Tjoe Tat dalam catatan memoarnya "*Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno*". Dalam catatan memoar tersebut menceritakan bahwa suatu ketika Menteri Oei Tjoe Tat pernah bertemu Soeharto yang pada waktu itu sambil marah-marah dengan mengatakan bahwa Indonesia telah dikhianati sebanyak dua kali oleh PKI dengan mengungkit kejadian pemberontakan PKI pertama pada tahun 1948 yang dianggap telah menusuk Indonesia dari belakang disaat Indonesia tengah gencar-gencarnya berjuang menghadapi agresi militer Belanda II. Oleh karena itu dengan pengkhianatan PKI yang kedua ini, maka bagi Soeharto saat ini tidak ada lagi yang

6 Salim Said, *Gestapu 65 PKI Aidit*, ed. oleh Andreas Kusumahadi, 1 ed. (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015).

7 Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

ditunggu selain membubarkan PKI.⁸

Selain membereskan dan membersihkan PKI sampai keakar-akarnya, Soeharto juga membersihkan TNI Angkatan Udara dari tentara beserta sebagian perwiranya yang berhaluan kiri. Sebelum peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965 oleh PKI, hubungan antara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara memang memburuk. Hubungan kurang harmonis ini antara kedua kubu ini bahkan sudah terjadi sejak peristiwa perang gerilya sewaktu Yogyakarta yang saat itu merupakan Ibu Kota RI diserang dan diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1949. Pada saat itu terjadi perbedaan tindakan antara kedua kubu tentara tersebut, TNI Angkatan Udara dibawah pimpinan kepala Stafnya, Marsekal Suryadharma lebih memilih mengikuti jejak Panglima Tertinggi, Presiden Soekarno dan wakilnya Bung Hatta untuk menyerah kepada Belanda. Sementara itu TNI Angkatan Darat dibawah pimpinan Panglimanya, Jenderal Sudirman memilih untuk berjuang mempertahankan NKRI dengan bergerilya.⁹

Oleh karena perbedaan dalam bertindak itulah akhirnya dikemudian hari terjadi pertentangan diantara kedua kubu TNI tersebut dengan saling menyalahkan satu sama lain. Disatu sisi pihak TNI Angkatan Udara menyatakan bahwa yang bersalah itu ialah pihak TNI Angkatan Darat dengan alasan tidak mengikuti Panglima Tertinggi, Presiden Soekarno

dan menganggap TNI Angkatan Darat telah melakukan insubordinasi.¹⁰ Namun pihak TNI Angkatan Darat menjawab dengan tegas bahwa keputusan yang dilakukan oleh Panglimanya, Jenderal Sudirman dalam mempertahankan NKRI sampai titik darah penghabisan adalah sesuatu yang mencerminkan seorang pejuang. Bahkan Jenderal Sudirman sendiri beserta pasukannya telah mengikatkan diri kepada sumpah tentara yaitu “tidak kenal menyerah”. Hubungan antara kedua kubu TNI tersebut semakin memburuk yang disebabkan oleh sikap Marsekal Suryadharma yang bersimpati dan loyal terhadap PKI. Bahkan istri dari Marsekal Suryadharma sendiri merupakan seorang aktivis PKI yang merupakan tokoh penting dalam pemberantasan film-film Amerika (Papias) oleh PKI pada masa orde lama.¹¹

Hubungan kurang harmonis antara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara itu terus berlanjut setelah digantikannya Menteri Panglima TNI Angkatan Udara Pertama, Marsekal Suryadharma oleh Marsekal Omar Dhani pada tahun 1962. Marsekal Omar Dhani adalah salah

8 Salim Said.

9 Said.

10 Insubordinasi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan tidak patuh atau melawan kepada atasannya baik saat dinas militer maupun diluar dinas militer dengan syarat atasannya itu telah memperoleh surat perintah dinas dalam rangka mewakili suatu kompi kesatuan-nya atau melakukan suatu tugas tertentu, lihat Anuar Bukhari dan Muhammad Abudan, “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PM NOMOR : 94-K / PM . III- 12/ AD/VI/2015,” *Jurnal Hukum Adigama*, 2015.

11 Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

satu pengagum berat Presiden Soekarno dan sangat loyal kepadanya. Oleh karenanya pengangkatan Omar Dhani menjadi Menteri panglima TNI Angkatan Udara oleh Presiden Soekarno tidak lain adalah untuk dijadikannya sebagai penyeimbang kekuatan TNI Angkatan Darat yang telah masuk dalam dunia perpolitikan. Oleh karena itu untuk pertama kalinya pada masa kepemimpinan Marsekal Omar Dhani sebagai Menteri Panglima TNI Angkatan Udara kedua inilah Presiden Soekarno mulai melibatkan TNI Angkatan Udara kedalam dunia perpolitikan Indonesia.¹²

Dalam keterlibatannya didunia perpolitikan Indonesia, selain menyetujui kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno yakni Nasakom (nasional, Agama, dan Komunis) dan melananya mentah-mentah, ia juga sangat loyal terhadap PKI yang juga merupakan partai berhaluan kiri seperti halnya Presiden Soekarno. Bahkan beberapa kali gagasan-gagasannya sama dengan yang diharapkan oleh PKI, seperti ia beberapa kali berbicara mengenai pembentukan angkatan kelima, suatu gagasan yang sangat diinginkan oleh PKI untuk membuat radikalisme dan militansi kepada masyarakat sipil.¹³ Karena Presiden Soekarno, orang yang sangat diloyali dan dikaguminya, juga sangat loyal terhadap PKI yang bahkan melindungi kepentingan-kepentingan PKI, akhirnya ia pun juga mendukung gerakan 30 September

1965 PKI yang oleh PKI gerakan tersebut dianggap sebagai sebuah “kegiatan pembersihan kontrarevolusioner” pada tubuh TNI Angkatan Darat. Setelah beberapa hari pasca gerakan 30 September 1965, akhirnya PKI yang melancarkan aksi tersebut dibasmi oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian para pendukung-pendukung PKI termasuk para tentara beserta perwira-perwiranya yang tercium memiliki loyalitas kepada PKI diadili dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub). Walaupun dalam Mahmillub tersebut Omar Dhani menyangkal dengan dalih dukungannya itu diralat bukan untuk PKI melainkan kepada Presiden Soekarno, tetap saja tidak dapat membebaskannya dari hukuman. Sebelumnya ia mendapat divonis hukuman mati, namun akhirnya ia hanya terkena hukuman penjara dan dibebaskan pada masa-masa akhir orde baru tahun 1995 dikarenakan faktor lanjut usia.¹⁴

Kebencian Soeharto ternyata tidak hanya terhadap PKI saja, melainkan terhadap pendukung Ir. Soekarno atau yang biasa disebut Soekarnois pun juga terkena imbas dari pembersihan Soeharto. Perlu diketahui bahwa pada masa-masa awal demokrasi terpimpin, Ir. Soekarno menerapkan konsep politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Presiden Soekarno menerapkan kebijakannya tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara TNI Angkatan Darat yang saat itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat anti komunis, dan PKI karena

12 Said.

13 Said.

14 Said.

pada waktu itu memang hubungan kedua kelompok tersebut memburuk. Kebijakan politik Presiden Soekarno itu yang dalam rangka menjaga keseimbangan kedua kubu dikenal dengan *balance of power politics*.¹⁵

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut PKI sangat antusias mendukung dan bahkan bertindak sebagai pendukung militan dari Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan oleh PKI mengingat walaupun mereka mempunyai banyak pengikut, namun tetap tidak bisa menandingi kekuatan Angkatan Darat yang anti komunis tersebut. Oleh karena itu mereka mencari pelindung dengan berlandung dibawah Pemimpin Besar Revolusi saat itu yaitu Presiden Soekarno. Mereka yakin bahwa Soekarnolah satu-satunya kekuatan yang berani, sanggup, dan mampu melindungi kepentingan PKI dari segala macam ancaman yang dilakukan Angkatan Darat. Sedangkan bagi pihak Presiden soekarno sendiri, PKI bukanlah hanya sebagai pendukung konsep politik Nasakom saja, melainkan juga sebagai kendarannya dalam rangka mengimbangi kekuatan Angkatan darat yang senantiasa kritis terhadap setiap kebijakan Presiden sendiri maupun PKI.¹⁶

Bahkan oleh Presiden Soekarno terhadap orang-orang yang kritis terhadap kebijakan PKI disebutnya sebagai menderitanya “*komunisto phobi*” yang artinya sama dengan “kontrarevolusi”. Pada masa Soekarno orang yang dituduh sebagai

kontrarevolusi atau *komunisto phobi* (terutama yang berasal dari masyarakat sipil) tersebut hidupnya secara perlahan-lahan dan terus menerus susah karena mereka menjadi sasaran teror oleh PKI yang berlandung dibalik Presiden Soekarno. Dengan adanya koneksi yang saling menguntungkan satu sama lain baik dari pihak PKI maupun Presiden Soekarno, maka terjadilah hubungan yang harmonis antara keduanya.¹⁷ Bahkan Jendral Yoga Sugomo dalam percakapannya dengan Soeharto sewaktu menjabat sebagai Pangkostrad menyakinkan bahwa Presiden Soekarno ada dibalik gerakan peristiwa gerakan 30 September 1965 tersebut. Jendral Yugo Sugomo menganalisis bahwa PKI berani melancarkan gerakan tersebut apabila sang Presiden ada dibalik mereka.¹⁸ Oleh karena sikap loyal Presiden Soekarno terhadap PKI pada masa demokrasi terpimpin itulah menyebabkan pendukung Soekarno juga dibersihkan oleh Soeharto dari jajaran pemerintahan Indonesia ketika menjabat menjadi Presiden kedua RI setelah melewati *power struggle*.¹⁹

17 Salim Said.

18 Salim Said.

19 *Power Struggle* atau pertempuran kekuasaan terjadi pada tahun 1968 antara Presiden Soekarno melawan Jenderal Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin partai tentara sebagai kendaraan politiknya menuju kursi kepresidenan. *Power Struggle* tersebut akhirnya dimenangkan oleh Jenderal Soeharto dan beliau bertakhta antara tahun 1968-1998 atau lebih kurang selama 30 tahun, lihat Salim Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*.

15 Salim Said.

16 Salim Said.

2. Masa Kepemimpinan Presiden Soeharto selama 30 Tahun

Seperti yang dikemukakan dimuka bahwa pada tahun 1968 terjadi pertarungan kekuasaan atau *power struggle* antara Presiden Soekarno melawan Jenderal Soeharto yang waktu itu bertindak sebagai pemimpin partai tentara. *Power Struggle* tersebut akhirnya dimenangkan oleh Soeharto dan resmi menjadi Presiden setelah sidang paripurna DPR pada tahun 1968. Ia berkuasa sebagai presiden antara tahun 1968-1998 atau lebih kurang selama 30 tahun. Kekuasaan presiden Soeharto yang begitu lama tersebut ditopang oleh dukungan tentara dan kemarahan masyarakat yang benci atau menjadi korban dari pergerakan PKI (masyarakat anti PKI). Sebagai politikus yang memiliki insting tajam dan sadar diri bahwa ia tidaklah mempunyai kharisma kepemimpinan yang harum dan pengaruh yang kuat dimata rakyat seperti Presiden Soekarno yang bahkan digelar “Penyambung lidah rakyat”, maka ia membangun rancangan-rancangan politiknya yang canggih untuk melanggengkan kekuasaannya.²⁰

Rancangan Politik Soeharto demi Kelanggengan Kekuasaannya

a. Pembersihan Birokrasi Pemerintahan dari Haluan Kiri

Diantara rancangan-rancangan politik Presiden Soeharto tersebut yang pertama ialah membersihkan para perwira

20 Salim Said, *Pemerintahan Soeharto Otoriter*, hlm. 2-3

TNI dan pejabat pemerintahan orde lama yang berhaluan kiri dan Soekarno. Seperti yang dijelaskan dimuka bahwa Presiden Soeharto yang dulunya berlatar TNI Angkatan Darat tidak loyal terhadap PKI, bahkan berkobar amarahnya tatkala mengetahui atasannya dibantai oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Selain itu alasan lain Presiden Soeharto tidak suka kepada PKI seperti yang dituturkan dalam salah satu dokumen Pusat sejarah TNI ialah bahwa PKI itu menurut Soeharto tidak sesuai dengan Pancasila karena berpegang teguh kepada Komunisme dan Marxisme. Dengan dibersihkannya golongan politik sayap kiri tersebut jelaslah membuat Soeharto semakin berkurang oposisi atau lawan politiknya sewaktu memegang jabatan Presiden. Selain itu Presiden Soeharto juga membersihkan sisa-sisa Soekarno dari tubuh pemerintahan RI, hal ini tak lain juga sebagai upaya menghilangkan sikap fanatik rakyat Indonesia dari paham Nasakom yang pada era demokrasi dipimpin sangat erat dengan PKI. Hal ini sebetulnya ialah sesuatu yang wajar ketika pergantian kepemimpinan, seperti Jenderal Ahmad Yani yang saat menduduki Menteri Panglima Angkatan Darat juga membersihkan sisa-sisa pendukung Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan kebijakan tersebut hampir tertutuplah ancaman-ancaman yang dilakukan oleh golongan politik sayap kiri terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.²¹

b. Mempromosikan Jenderal yang

21 Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

Tidak Punya Potensi

Rancangan politik kedua ialah dengan mengangkat Jenderal yang tidak mempunyai potensi dalam menggerakkan tentara untuk merebut jabatan kepresidenan dari Soeharto. Perlu diketahui bahwa Presiden Soeharto naik pada jabatan kepresidenan dengan menggunakan kekuatan tentara (partai tentara) dan komponen pendukung utama Presiden Soeharto pada awal-awal kepemimpinannya ialah tentara. Selain itu dominasi dwi fungsi ABRI pada masa awal pemerintahannya masih sangat tinggi. Hal ini berbalik dengan kekuatan sipil yang masih terbatas pada awal-awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Maka otomatis melalui perhitungan analisis politik Presiden Soeharto yang terkenal cangih pada masa itu, ia berpandangan bahwa ancaman yang dapat mengancam kedudukannya sebagai Presiden justru bukan dari kalangan sipil, melainkan dari kalangan militer yang merupakan basis kekuatannya sendiri. Oleh karena itu akhirnya ia melakukan kebijakan dengan mengangkat para Jenderal yang tidak mempunyai potensi dalam menggerakkan tentara untuk mengambil alih jabatan kepresidenan.²²

Maksud para Jenderal yang tidak mempunyai potensi tersebut ada berbagai bentuk dalam sepanjang kepemimpinannya, mulai para Jenderal yang jauh dari perpolitikan Indonesia atau tidak suka dunia perpolitikan, Jenderal yang

belum mempunyai pengalaman pendidikan militer sebagaimana layaknya para Jenderal yang diangkat sebagai Panglima ABRI atau Pangab, dan bahkan pengangkatan Pangab dari jenderal yang sudah lama berhenti berdinastis sebagai tentara. Yang pasti pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto tersebut, siapapun orangnya dan apapun jabatannya asal ia mampu menunjukkan sikap kloyalannya dan patuh terhadap Presiden Soeharto dapat menduduki bagian-bagian penting dalam pemerintahan. Namun apabila menurut Presiden Soeharto setelah pengangkatan para Jenderal itu mereka mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat dan tentara serta kritis terhadap setiap kebijakannya maka ia tak segan-segan akan dicopot langsung mereka dari jabatan perpolitikan Indonesia dan terkadang dialihkannya kejabatan pemerintahan yang jauh dari perpolitikan negeri seperti sebagai Duta Besar atau lembaga pemerintahan lainnya. Para jenderal pada dasarnya tidak lain hanya digunakan oleh Presiden Soeharto demi kepentingan kelanggengan jabatan kepresidenannya dan akan terbuang setelah waktu manfaatnya telah habis. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa pada dasarnya para Jenderal tersebut hanya sebagai kendaraan Soeharto saja dalam dunia perpolitikannya.

Terdapat nama-nama Jenderal TNI yang dipromosikan oleh Presiden Soeharto menduduki kedudukan penting dalam perpolitikan RI yang berlatar tentara dan dianggap belum memenuhi

22. Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*.

kriteria diangkat kejabatan tersebut.

1) Jenderal TNI Andi Muhammad Jusuf

Pertama ialah Jenderal TNI Andi Muhammad Jusuf, ia merupakan salah satu dari tiga jenderal (Jenderal Amir Mahmud dan Jenderal Basuki Rahmat) saat itu yang sangat berperan penting dalam mendapatkan Supersemar pada tahun 1966 untuk Jenderal Soeharto menuju menuju kursi kepresidenan. Jabatan militer terakhir Jenderal Jusuf sebelum diangkat menjadi Menteri Perindustrian Ringan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 ialah sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin dan pangkat militer terakhirnya sebagai Brigadir Jenderal (Brigjen). Pada masa demokrasi terpimpin ia sangat loyal terhadap Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu yakni Jenderal Ahmad Yani. Namun setelah peristiwa Gerakan 30 september 1965 oleh PKI dengan terbunuhnya tujuh Jenderal termasuk Jenderal Ahmad Yani, akhirnya ia alihkan loyalitasnya kepada Pangkostrad waktu itu yakni Jenderal Soeharto. Loyalitasnya tersebut ia wujudkan dengan menjadi aktor penting bersama dua Jenderal lainnya seperti yang disebutkan dimuka dalam mendapatkan Supersemar untuk Jenderal Soeharto menuju kursi kepresidenan.²³

Dengan insting politik yang

²³ Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

tajam, Presiden soeharto tahu tentang beberapa Jenderal yang menurutnya tidak akan membahayakan kekuasaannya. Menurut perhitungannya, ia memandang ketiga Jenderal tersebut (Andi Muhammad Jusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat) tidak akan menjadi membahayakan kekuasaannya apabila didudukkan sebagai pejabat pemerintahan yang dekat dengan perpolitikan. Oleh karenanya ketiga Jenderal tersebut setelah berkuasanya Presiden Soeharto mendapatkan tempat yang strategis dalam perpolitikan Indonesia.²⁴ Hal ini berbalik dengan keadaan *Trio King Maker* yang terdiri dari tiga perwira (Ahmad Kemal Idris, Hartono Rekso Dharsono, dan Sarwo Edhi Wibowo) yang telah berusaha menyingkirkan Presiden soekarno dengan mendesaknya mengeluarkan Supersemar dan akhirnya terbukalah jalan Jenderal Soeharto menuju kursi kepresidenan. Dengan perhitungan yang matang, ia memandang bahwa *Trio King Maker* tersebut mempunyai sikap-sikap dan khawatir akan pengaruhnya dalam tentara maupun masyarakat, akhirnya ia mengalihkan ketiga Jenderal tersebut pada posisi yang jauh dari perpolitikan saat itu.²⁵

Pada awal-awal orde baru Muhammad Jusuf masih menduduki jabatan Menteri Perindustrian Ringan, meskipun begitu ia masih

²⁴ Said.

²⁵ Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*.

menunjukkan sikap loyalitasnya kepada Presiden Soeharto. Loyalitasnya tersebut ditunjukkan sewaktu ia dengan beraninya membela Presiden Soeharto mengenai kerasnya sikap Pemerintah terhadap para Mahasiswa dan memberi peringatan kepada para Jenderal TNI agar tidak mempunyai niatan untuk merebut kekuasaan Presiden Soeharto. Karena loyalitas penuh terhadapnya inilah akhirnya pada bulan Maret 1998 Presiden Soeharto mengangkat Andi Muhammad Jusuf sebagai Panglima ABRI (Pangab). Penunjukkan Jenderal Muhammad Jusuf menjadi Pangab tersebut menjadi buah bibir dikalangan tentara maupun masyarakat waktu itu. Hal ini dikarenakan Jenderal Muhammad Jusuf waktu ini telah meninggalkan dinas militer selama lebih kurang 14 tahun, ini adalah hal yang tak lazim dalam pengangkatan Panglima ABRI pada masa orde lama maupun masa reformasi saat ini. Namun yang jelas pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto ini adalah bahwa siapapun dengan jabatan apapun asal menguntungkan bagi kelanggengan kekuasaan Presiden dapat diangkatnya kejabatan apapun.²⁶

2) Letnan Jenderal TNI Ali Murtopo

Perwira selanjutnya yang diangkat Presiden Soeharto hanya

dimanfaatkan untuk kelanggengan kekuasaannya ialah Letnan Jenderal (Letjen) Ali Murtopo. Ali Murtopo ialah perwira yang yang menjadi tokoh penting dan berpengaruh pada masa awal Presiden Soeharto bahkan masyarakat banyak yang menyebutnya sebagai patih Presiden Soeharto. Ali Murtopo pada saat itu menjadi pemimpin Operasi Khusus (Opsus) dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Oleh karena itu banyak masyarakat pada waktu itu memanggilmnya dengan raja intel. Walaupun Jenderal bintang dua, ia sangat dekat dengan Presiden Soeharto dan mempunyai banyak gagasan dan tindakan politik yang semata-mata digunakannya sebagai bentuk kelojalannya terhadap Presiden Soeharto. Gagasan dan tindakan yang dilakukannya sangat mempengaruhi terhadap segala keputusan Presiden Soeharto. Sejarawan Asvi Warman Adam dalam wawancaranya di stasiun televisi mengatakan bahwa pada dasarnya Indonesia pada tahun 1968 dapat melangsungkan pemilihan umum untuk pertama kalinya, namun Soeharto meminta agar pemilihan umum tersebut diundur sampai tahun 1971 karena waktu itu ia masih belum siap. Dalam rentang waktu antara tahun 1968-1971 tersebut Ali Murtopo disertai tugas oleh Soeharto untuk melakukan intervensi dan penetrasi ke partai-partai agar hasil pemilihan umum tahun

²⁶ Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

1971 tersebut sesuai dengan keinginan Soeharto yakni Partai Golongan Karya (Golkar).

Peran Ali Murtopo tidak hanya sebatas itu, pada saat Jenderal Sumitro menjabat sebagai Pangkoptamtib, ia banyak melawan gagasan-gagasan Jenderal Sumitro yang selain dinilainya akan merugikan dirinya sendiri, juga akan merugikan dan membahayakan Presiden Soeharto. Beberapa kebijakan-kebijakan Jenderal Sumitro tersebut adalah dalam bidang ekonomi dengan memberikan masukan kepada para teknokrat yang dipimpin oleh Widjono Nitisastro yang isinya supaya ia menumbuhkan para pengusaha pribumi. Dalam upaya agar gagasannya itu terwujud maka ia mengundang para Menteri mengelola ekonomi Indonesia, namun kegiatan mengundang Menteri itulah yang dianggap mengganggu oleh Ali Murtopo. Banyak pengamat politik waktu itu yang memandang sikap kontra Ali Murtopo terhadap gagasan kebijakan Sumitro tersebut sebenarnya juga mencerminkan sikap Presiden Soeharto yang juga terganggu karena telah berani mencampuri urusan pembangunan ekonomi pemerintahan Orde baru yang dirancangnya. Karena sikap kontra Ali Murtopo kepada Jenderal Sumitro inilah yang akhirnya hubungan diantara dua tokoh tersebut memanas. Bahkan banyak pengamat

politik yang mengatakan bahwa Ali Murtopo sangat berperan besar dalam pencabutan jabatan Pangkoptamtib Sumitro oleh Presiden Soeharto setelah ia tidak gagal mengatasi peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) pada tahun 1974.²⁷

Demikianlah pengaruh besar dari Ali Murtopo sewaktu menjabat menjadi pemimpin Opsus yang amat dekat dengan Presiden Soeharto. Karena besarnya pengaruh Ali Murtopo dalam setiap keputusan sang Presiden itulah maka banyak masyarakat Indonesia menyebutnya “sang arsitek”. Namun Presiden Soeharto sangat canggih dalam setiap kebijakan politiknya, ia pada dasarnya hanya mempergunakan seseorang hanya untuk kepentingannya sendiri lalu kemudian membuangnya sewaktu kegunaannya telah habis. Hal ini juga berlaku pada Ali Murtopo yang merupakan kaki tangannya saat kegunaannya masih ada. Ia bernasib sama dengan *Trio King Maker*, setelah menjabat sebagai pemimpin Opsus dan CSIS serta menjadi menteri Penerangan, ia oleh Presiden Soeharto dialihkan ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA), instansi pemerintahan yang jauh dari kekuasaan Presiden. Artinya ia tersingkir dari kabinet pemerintahan dan hanya duduk di jabatan yang menasehati Presiden, itu pun kalau ia didengar olehnya, Presiden Soeharto

²⁷ Said, *Pemerintahan Otoviter Soeharto*.

sangat jarang menerima masukan oleh DPA. Hal ini dikarenakan Presiden Soeharto sendiri mempunyai misi tersembunyi yang berbeda dari lainnya, yakni menjadikan dirinya berkuasa lama. Banyak alasan yang melatarbelakangi dicampakkannya Ali Murtopo dari lingkaran Presiden, mulai dari popularitasnya yang semakin menanjak yang membuat khawatir Presiden Soeharto akan ancaman terhadap kekuasaannya dan lain-lain.²⁸

3) Jenderal TNI Leonardus Benyamin Moerdani

Selanjutnya perwira ketiga yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk dijadikan Panglima ABRI yang pengangkatannya menjadi buah bibir baik dikalangan masyarakat maupun tentara masa itu adalah Jenderal

TNI Leonardus Benyamin Moerdani atau lebih dikenal dengan Jenderal Benny Moerdani. Sebelum diangkat menjadi Panglima ABRI ia menjabat sebagai Kepala Intel Strategis, Kepala Intel Komkamtib, hingga Wakil Kepala bakin di Seoul, Korea Selatan. Ia merupakan tentara keturunan Indo-Jerman yang menganut agama Katolik. Sosoknya kala itu sangat populer dikalangan masyarakat akan jabatan intel yang didudukinya, oleh karenanya masyarakat lazim menyebutnya “Si Raja Intel”. Bahkan kepopulerannya telah ada sebelum duduk sebagai Kepala Intel, yakni pada waktu ia menjadi pahlawan dalam operasi penumpasan Permesta dan operasi Trikora di Irian Barat. Memang kala itu rezim yang diduduki oleh Presiden Soeharto sangat terkenal akan intelnya yang berpengaruh, banyak pengamat yang mengatakan bahwa adanya Penembak Misterius (Petrus) yang menertibkan keamanan dan ketertiban masyarakat kala itu diyakini dilakukan oleh para intel TNI. Oleh karenanya banyak masyarakat yang takut dengan Benny Moerdani yang menjabat sebagai Kepala Intel waktu itu. Adapun ucapan Kepala Intel ini yang terkenal ialah “Saya kenal kamu, tapi kamu tidak kenal saya.”²⁹

Pengangkatan Kepala Intel ini oleh Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI sempat menjadi buah

28 Sikap yang dapat menunjukkan bahwa Presiden Soeharto hanya menjadikan orang-orangnya sebagai kendaraan politiknya saja ialah dalam catatan memoarnya “*Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*”. Dalam catatan memoarnya tersebut ia mengatakan “*Sebelum Ali Murtopo meninggal, ada yang suka menilai bahwa Ali Murtopo itulah yang menentukan. Karena apa? Mungkin karena dia pandai bicara, berani. atau dinilainya sebagai Aspri, sehingga merupakan pembantu utama saya yang terdekat dan segala sesuatunya bergantung pada dia. Dengan nilainya seperti ini, orang mengira, bahwa pemerintah tidak bisa mengambil keputusan tanpa dia. Karena Ali Murtopo memimpin CSIS yang di Tanah Abang itu, maka orang mengira bahwa lembaga itulah dapur pemerintah. Kalau bergantung pada Ali Murtopo, berarti kalau Ali Murtopo meninggal, pemerintah tidak bisa jalan. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan meninggalnya Ali Murtopo, pemerintah tetap bisa berjalan. Dan saya bisa memimpin. Maka tidak benar bahwa segalanya itu bergantung pada dia*”. Lihat Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

29 Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*.

bibir pada masa itu bahkan menuai protes dari para perwira aktif yang senior maupun Purnawirawan. Protes yang datang waktu itu ialah dari Jenderal TNI Purnawirawan Sumitro, ia menyarakankan agar Presiden Soeharto menjadikan Benny Moerdani sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) dahulu agar ia mendapatkan pengalaman teritorial sebagai bekal dalam saat duduk sebagai Panglima ABRI nanti. Alasan dan usulan dari Jenderal Purnawirawan Sumitro ini ada benarnya, sebenarnya Benny Moerdani sendiri waktu itu memang belum mendapatkan pengalaman staf, pengalaman teritorial, pengalaman pendidik, bahkan ia pun tak pernah ikut dalam Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad). Hampir sebagian pengalaman dinas ia abdikan untuk intelijen dan pasukan khusus TNI. Namun usulan dari Jenderal Purnawirawan Sumitro ini seakan tidak digubris oleh Presiden Soeharto, ia pada waktu itu hanya mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda pengangkatan Benny Moerdani. Walaupun setelah dilantik menjadi Panglima ABRI pada tahun 1983, ia tetap menjabat sebagai Kepala Intel dan aparat sekuriti yang menjaga Presiden Soeharto. Sampai saat ini hanya Jenderal Benny Moerdani inilah satu-satunya Panglima ABRI yang merangkap tiga jabatan

sekaligus.³⁰

Pada awalnya Jenderal Benny Moerdani ini sangat loyal kepada Presiden Soeharto, ia juga senantiasa menjaganya dengan penuh perhatian dan bahkan waktu itu muncul dugaan dari masyarakat bahwa hubungan antara Jenderal Benny Moerdani dan Presiden Soeharto itu layaknya anak dan bapak.³¹ Tak hanya juga tak sedikit orang yang menyebut Jenderal Benny Moerdani sebagai “anjing herder penjaga Presiden Soeharto”.³² Walaupun sempat diragukan kemampuannya pada awal sebelum pengangkatannya oleh beberapa pihak, namun ia mampu menjawab berbagai persoalan dalam tubuh TNI bahkan menjadikannya lebih kuat. Ketertiban dan keamanan dalam negeri yang seyogianya tugas kepolisian pun TNI juga ikut campur didalamnya. Teror yang dilakukan oleh Gabungan Anak Liar (Gali) dibeberapa daerah waktu itu sangat memperburuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena waktu itu polisi sulit mengatasi Gali tersebut dan rakyat, akhirnya teror yang dilancarkan Gali tersebut dapat dipadamkan oleh Penembak Misterius (Petrus). Pada waktu itu banyak masyarakat yang belum tahu tentang dalang dan pelaku dibalik Petrus ini, peristiwa ini juga menuai banyak kecaman dari lur negeri maupun

30 Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

31 Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*.

32 Said.

dari rakyat Indonesia sendiri terutama para pejuang hak asasi manusia. Dengan adanya banyak kecaman atas tindakan Petrus tersebut, maka Jenderal Moerdani bersama Jenderal Polri Anton Sudjarwo menegaskan dihadapan pers bahwa mereka tidak ikut campur dalam petrus tersebut. Namun dikemudian hari Presiden Soeharto dalam memoarnya yang terbit menjelaskan bahwa Petrus tersebut merupakan salah satu tindakan pemerintah sebagai terapi kejutan. Oleh karena itulah hal ini menjadikan Jenderal Moerdani sangat kecewa dan merasa dipermalukan oleh Presiden Soeharto yang menyebabkannya dicap oleh masyarakat sebagai dalang dibalik Petrus.³³

Keyolalitan Benny Moerdani kepada Presiden Soeharto mulai memudar setelah diangkat olehnya sebagai Panglima ABRI. Ia beberapa kali kerap mengkritiki sang Presiden mengenai kebijakan-kebijakannya yang menurutnya kurang berkenan. Ia bahkan pernah menasehati kepada Presiden Soeharto supaya turun dari jabatan Presiden yang didudukinya karena dianggap telah terlalu lama dan sudah tua mengingat usianya telah memasuki kepala tujuh. Ia juga beberapa kali kerap mengkritiki bisnis-bisnis yang dilakukan oleh anak-anak sang Presiden. Selain itu ia bersama Jenderal TNI Purnawiran lainnya mengkritiki bahkan tidak

setuju terhadap kebijakan Presiden Soeharto yang mengangkat Letnan Jenderal TNI Sudarmono sebagai wakil Presiden, mereka beranggapan bahwa Sudarmono adalah merah (terpengaruh PKI).³⁴ Selain itu ketidaksenangan Jenderal Moerdani beserta para Jenderal TNI Purnawirawan terhadap kebijakan Presiden Soeharto yang menyusupkan sipil kedalam partai Golkar juga ikut memperparah kerenggangan antara Jenderal Moerdani dan presiden Soeharto. Perlu diketahui bahwa para Perwira TNI yang pada mulanya mendominasi partai Golkar tidak senang dengan kebijakan Presiden Soeharto yang makin lama menyusupkan sipil kedalamnya dan dan berakibat makin menyempitkan dominasi tentara dalam partai Golkar.³⁵

Melihat Jenderal Benny Moerdani yang ternyata makin kritis dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ia lakukan dan makin pula populer dikalangan masyarakat Indonesia, maka Presiden Soeharto merasa terancam dengan keberadaan Jenderal Benny tersebut yang akan berpeluang besar menggantikannya sebagai Presiden. Oleh karena itu ia mencopot Jenderal Benny Moerdani dari jabatan Panglima ABRI pada tahun 1988. Hal ini tak lain sama dengan perlakuan Presiden Soeharto

33 Said.

34 Said.

35 Said.

kepada para Jenderal TNI sebelumnya yang juga akan diberhentikan dari jabatannya apabila ia merasa dirinya terancam oleh Jenderal tersebut. Perlakuan Presiden Soeharto ini kepada Jenderal Benny Moerdani ini lebih parah dari pada para Jenderal sebelumnya. Hal ini dikarenakan walaupun ia telah berhenti dari jabatan Panglima ABRI, ia tetap menyuarakan saran dan kritik-kritiknya terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Banyak pengamat yang memandang bahwa Benny Moerdani ini telah menganggap dirinya sebagai Negarawan. Oleh karena itu ia menganggap bahwa berhenti dari Panglima ABRI bukanlah akhir dari memperjuangkan bangsa ini. Sebenarnya anggapan yang disampaikan oleh pengamat ini tidaklah salah mengingat Benny Moerdani sendiri mempunyai idola yakni Jenderal Besar Sudirman yang terkenal sebagai Negarawan yang tak kenal menyerah.³⁶

Jenderal Benny Moerdani ini walaupun telah dicopot dari jabatan Panglima ABRI masih tetap menyuarakan kritik-kritiknya terhadap Presiden Soeharto, mulai dari menyuruh kepada Panglima ABRI setelahnya, Try Sutrisno meminta agar Presiden Soeharto turun dari jabatan Presiden dan ia menunjukkan ketidaksetujuannya bersama para Jenderal TNI Purnawirawan atas pengangkatan

Harmoko yang merupakan seorang sipil menjadi Ketua Partai Golkar oleh Presiden Soeharto. Ia juga menunjukkan ketidaksengangannya kepada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk Presiden Soeharto dengan alasan bahwa organisasi itu hanyalah kendaraan politiknya saja dalam merekrut dukungan dari kaum Islam. Selain itu ia bersama Jenderal TNI Purnawirawan tiba-tiba mengusulkan nama Try Sutrisno menjadi Wakil Presiden pada waktu sidang Paripurna DPR tahun 1993 yang tanpa sepengetahuan Presiden Soeharto dan Jenderal Try Sutrisno sendiri sebelumnya. Sebelumnya Jenderal Try Sutrisno adalah Jenderal yang diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI menggantikan Benny Moerdani, Presiden Soeharto sebelumnya memandang Try Sutrisno adalah sebagai Perwira TNI yang bebas dari orang-orangnya Benny Moerdani dan ia tidak mengetahui bahwa Try Sutrisno ini merupakan kolega militer Benny Moerdani dahulu. Pengangkatan Jenderal Try Sutrisno ini pun juga menjadi buah bibir masyarakat, hal ini dikarenakan ia merupakan satu-satunya Panglima ABRI dari kalangan Perwira Zeni. Setelah menjabat menjadi Panglima ABRI, hubungan antara Try Sutrisno dan Benny Moerdani malah makin akrab, inilah yang menjadi titik awal Presiden Soeharto membenci Try Sutrisno. Singkat cerita dengan

36 Said.

melihat tindakan kritis yang terus dilancarkan Benny moerdani yang dilancarkan kepadanya, akhirnya Presiden Soeharto melakukan Bennyisasi, yaitu dengan membersihkan para perwira-perwira TNI yang terpengaruh Benny Moerdani atau dekat dengan Benny Moerdani.³⁷

Dengan melihat contoh ketiga Jenderal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya jelas bahwa Presiden Soeharto merupakan seorang politikus yang handal dan canggih. UUD 1945 yang belum diamandemen tentang penentuan batasan waktu berkuasanya Presiden benar-benar dimanfaatkan dengan baik demi melanggengkan kekuasaannya. Dengan insting tajamnya ia tahu bahwa rezimnya yang didominasi oleh tentara sangat kecil sekali kemungkinan dari kaum sipil akan menggoyangkan kursi jabatannya, maka sebaliknya sangat besar sekali kemungkinan dari para tentara yang menjadi pendukung utama sang Presiden itu sendiri dalam merebut kursi jabatannya. Oleh sebab itu dengan mengangkat para Jenderal yang tidak cakap atau tidak memiliki potensi dalam menjabat adalah cara yang tepat untuk menghindarkan ia dari ancaman jabatannya. Namun apabila melalui instingnya pula dirasa para Jenderal tersebut mempunyai kecakapan, pengaruh yang kuat, baik dalam masyarakat sipil maupun militer,

dan bahkan berani mengkritisi atau menentang setiap kejkannya, maka ia tidak segan-segan mencopot jabatan Jenderal tersebut.

c. Pemberangusan Pers yang Bernada Kritik terhadap Pemerintah

Pada masa Orde Baru kebebasan pers dapat dikatakan sangat terbatas, terutama bagi para kritikus yang ingin menyuarakan kritiknya kepada rezim Soeharto yang cenderung otoriter kala itu. Dengan instingnya yang tajam, Presiden Soeharto meyakini bahwa kritikus tersebut apabila dibiarkan akan mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergolakan masa yang akan membahayakan kedudukannya sebagai Presiden. Banyak pada waktu itu para wartawan dan penulis yang mendekam di penjara karena dianggap oleh Pemerintah mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Salah satu Wartawan tersohor yang masuk dalam tahanan waktu itu ialah Mochtar Lubis, ia adalah tokoh yang terkenal dalam membela demokrasi bahkan A.H. Nasution sempat memberikan gelar baginya sebagai Pejuang Demokrasi, selain itu ia juga merupakan tokoh yang menentang terhadap korupsi di Pemerintahan. Sebelumnya ia mendirikan koran "Harian Indonesia Radja" pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, namun karena dalam koran tersebut memuat komentar-komentar dan kritik-kritik terhadap Pemerintah akhirnya koran tersebut ditutup oleh Pemerintah dan Mochtar Lubis juga

37 Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

tak luput dari hukuman tahanan. Hal ini pun tak ubahnya pada masa Orde Baru, ia juga mendekam dalam penjara, namun jiwa jurnalistiknya belumlah pudar, ia juga masih menulis buku di penjara. Banyak tokoh saat itu yang menganggap Mochtar Lubis sebagai wartawan atau penulis yang berani.³⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koran pada zaman Orde baru maupun Orde Lama mempunyai fungsi yang berbeda dari koran zaman sekarang. Kekuatan koran sangat urgent dan penting kala itu, hal ini dikarenakan koran pada masa kedua rezim tersebut berfungsi sebagai alat perjuangan Indonesia. Pada kolom koran waktu itu banyak memuat tulisan-tulisan yang mengindikasikan kritik dan saran terhadap Pemerintahan demi kebaikan Indonesia. Selain itu kekuatan koran ini pulalah yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, banyak pemuda-pemuda pembentuk Negeri Indonesia kala itu seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Mohammad Yamin, dan lainnya yang dahulu menyuarakan gagasan-gagasannya mengenai kemerdekaan Indonesia melalui koran. Peran koran tidak sampai itu, ia sangat berperan penting dalam penyebaran berita Indonesia telah merdeka di beberapa daerah Indonesia maupun luar negeri. Oleh karenanya pada zaman pra kemerdekaan dan kemerdekaan inilah dapat dikatakan bahwa koran mengalami masa keemasannya sebagai alat perjuangan walaupun

³⁸ Said.

juga masih tetap ada gangguan dari pemerintah penjajah waktu itu. Sayangnya fungsi koran sebagai alat perjuangan pada era pasca kemerdekaan telah berangsur-angsur meredup. Hal ini dikarenakan Presiden Soekarno pada saat menjelang kekuasaannya cenderung otoriter dan Presiden Soeharto yang otoriter penuh telah membatasi gagasan-gagasan Pemuda Negeri karena dianggap membahayakan kekuasaannya.³⁹

Disamping koran sebagai alat untuk perjuangan, koran juga dapat pula difungsikan sebagai alat pemecah belah persatuan dan sarana kudeta kepada NKRI, hal ini dapat dilihat pada masa Demokrasi Terpimpin banyak sekali kolom koran yang memuat ajaran paham Komunisme dan berita pemfitnahan seperti isu Dewan Jenderal sebagai upaya PKI mendapat dukungan dari masyarakat dalam kudeta kepada NKRI. Bahkan pada saat itu PKI telah mendominasi koran-koran di Indonesia dan menyerang koran-koran yang menjadi oposisi PKI. Dengan berkaca dari masa Demokrasi Terpimpin ini, tidak menutup kemungkinan yang menjadi alasan Presiden Soeharto sangat selektif dalam penerbitan koran-koran yang terbit waktu itu, terutama untuk menghindari oknum yang ingin memecah-belah NKRI. Selain itu karena hasratnya yang ingin menduduki kursi Kepresidenan lebih lama, kritik-kritik perjuangan pun akhirnya juga menjadi korban dari pemberagusan Soeharto. Oleh karena itu era Soeharto dapat dikatakan

³⁹ Said.

sebagai penutup fungsi koran sebagai alat perjuangan. Begitulah kekuatan koran pada zaman tersebut yang sangat berbeda dengan koran pada zaman sekarang yang hanya sebagai produk industri saja. Fungsi radio dan televisi yang masih terbatas pada zaman dahulu hampir sama dengan koran, ia dapat berfungsi sebagai alat perjuangan, namun juga bisa berfungsi sebagai alat pemecah belah persatuan dan kudeta NKRI seperti yang dilakukan oleh PKI.⁴⁰

d. Tindakan Keras terhadap Para Demonstran

Kepemimpinan Presiden Soeharto kerap diwarnai beberapa demonstran yang sangat membahayakan bagi ketertiban dan keamanan RI. Perlu diingat bahwa jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya dikarenakan adanya krisis moneter yang mengakibatkan kerusuhan dan demonstrasi di Ibu Kota Jakarta hingga Presiden Soeharto menyerahkan mandatnya kepada B.J Habibie. Pada masa itu para pengamat politik mengungkapkan bahwa kekuatan politik ABRI yang menjadi komponen pendukung utamanya tidak sekuat dulu lagi, oleh karenanya mereka tidak lagi setegas awal-awal Orde Baru. Hal ini dapat dibuktikan pada saat berakhirnya Orde Baru, para Perwira ABRI mengadakan rapat untuk bersepakat menghapus doktrin Dwi Fungsi ABRI dan hanya fokus kepada satu tugas, yakni menjaga keamanan dan ketertiban NKRI.

Selain itu alasan lain kejatuhan rezim Soeharto yakni juga diperparah dengan adanya krisis moneter yang mulai terjadi pada tahun 1997. Krisis moneter tersebut menyebabkan demonstrasi besar-besaran di Ibu Kota, kebanyakan dari mereka ialah berasal dari kalangan buruh atau pegawai dan Mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia.⁴¹

Jauh sebelum itu, pada awal-awal Orde Baru yakni ketika masih kuat-kuatnya Dwi Fungsi ABRI yang menjadi basis kekuatan utama sang Presiden, segala bentuk demonstrasi yang ditujukan kepada Pemerintah dapat dipadamkan. Namun cara yang digunakan oleh Pemerintah saat itu banyak menuai kecaman, hal ini dikarenakan Pemerintah tidak segan-segan dapat menumpahkan darah kepada para Demonstran. Sebenarnya penumpahan ini masih tetap berlanjut hingga masa-masa akhir Orde Baru seperti peristiwa Semanggi, tragedi Trisakti, Tanjung Priok, dan lain-lain.⁴² Adapun contoh pergolakan demonstrasi pada awal Orde baru ialah peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) pada tahun 1974. Demonstrasi dikarenakan sikap masyarakat yang menolak kunjungan Tanaka Kakuei, Perdana Menteri Jepang dan saat itu juga diiringi dengan

40 Dharyanto Tito Wardani, "Perlawanan Intelektual Pribumi Di Jawa Barat Tahun 1923-1925," *Patanjala* 8 (2016): 11.

41 Lilik Eka Aprilia, Kayan Swastika, dan Sumarjono, "Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998," *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2014* 1 (2014): 1-9.

42 Dini Hardianti, Rahayu, dan Joko Setiono, "Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-13.

mulai masuknya barang-barang impor dari Jepang. Dengan kata lain, dapat ditarik benang merah bahwa penyebab demonstrasi tersebut adalah sikap penolakan masyarakat Indonesia atas investasi asing yang masuk ke Indonesia. Walaupun dapat dipadamkan demonstrasi tersebut mengakibatkan kerusakan-kerusakan fasilitas umum, maka sebagai ganti atas kurang sempurnanya menjaga ketertiban umum tersebut, Jenderal Sumitro yang merupakan Pangkobkamtib waktu itu dicopot dari jabatannya oleh presiden Soeharto.⁴³

e. Mencari Simpati Golongan Islam

Pada awal-awal Orde Baru, Presiden Soeharto memang boleh dikatakan kurang simpati kepada Islam. Bahkan menurut beberapa sumber, sikap alergi Presiden Soeharto sudah terlihat sebelum naik menjadi Presiden. Diantara sumber yang menyebutkan tersebut ialah dari Harry Tjan Silalahi (Sekretaris Jenderal Partai Katolik) yang dulunya sempat dekat dengan Soeharto. Ia mengatakan bahwa setelah operasi penumpasan PKI yang melakukan peristiwa Gestapu, ia bersama Subchan Z.E (Ketua PBNU yang juga merupakan tokoh penting dalam penumpasan PKI bersama Harry Tjan) datang menemui Soeharto di Markas Kostrad. Dalam diskusi tersebut Subchan menyampaikan rencana aksi massa selanjutnya dengan mengucapkan kata

“*Insya Allah*”, hal itu kemudian membuat Soeharto terasa kesal dengan mengatakan “*Kenapa harus Insya Allah*”. Kemudian setelah diskusi tersebut, Subchan mengatakan kepada Harry Tjan bahwa Soeharto itu adalah orang yang tulus atau abangan.

Sumber lain datang dari Prof. Salim Said, dalam bukunya “Dari Gestapu ke Reformasi” ia pernah menyaksikan bahwa Soeharto pernah melotot kepada santri wanita yang menyarankan agar aksi demonstrasi dukungan terhadap ABRI diakhiri dengan pembacaan doa. Selain itu berdasarkan pengakuan sendiri Presiden Soeharto, ia pernah mengatakan bahwa ia adalah orang yang beragama Islam, namun Islamnya tersebut adalah Islam hakikat, bukan syariat. Dalam penjelasannya tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Presiden Soeharto memang hanyalah orang yang beragama Islam abangan, bukan mukmin yang menjalankan syariat Allah. Bahkan dalam wawancara antara Prof. Salim Said dengan Jenderal TNI Purnawiran Benny Moerdani, Benny Moerdani mengatakan bahwa Presiden Soeharto inilah yang merupakan orang anti Islam. Namun Benny Moerdani tidak menjelaskannya secara detail tentang alasannya dengan menyebutnya anti Islam. Terlepas dari itu pastilah Benny Moerdani mempunyai alasan tertentu sebab ia bertahun-tahun mengenal dekat Presiden Soeharto lewat pekerjaannya sebagai pengawal pribadi Presiden.⁴⁴

43 Ipong Jazimah, “MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru,” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3, no. 01 (2013): 9–34, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.902>.

44 Salim Said, *Dari Gestapu ke Reformasi*.

Namun setelah memasuki masa akhir Orde Baru (lebih kurang 10 tahun terakhir kepemimpinannya), sikap Presiden Soeharto terhadap Islam sangat berbanding terbalik dari masa awal Orde Baru. Pada masa akhir pemerintahannya tersebut ia menunjukkan sikap kelayalannya kepada Islam, bahkan ia juga menjalankan syariat sebagai kewajiban dari seorang muslim. Kelayalannya kepada Islam tersebut diwujudkan dalam beberapa kebijakan-kebijakannya, seperti membolehkan siswi memakai jilbab yang padahal sebelumnya hal ini dilarang oleh Daud Jusuf, Menteri Pendidikan. Presiden Soeharto juga membangun Bank Muamalat yang berlandaskan syariat Islam di Indonesia. Selain itu ia juga memprakasai pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan B.J Habibie sebagai pimpinannya.⁴⁵ Pembentukan ICMI tersebut menuai banyak kritikan dan ketidaksetujuan dari para Jenderal TNI Purnawirawan, termasuk Benny Moerdani. Alasan Benny Moerdani tidak setuju dengan pembentukan ICMI tersebut karena ujung-ujungnya organisasi tersebut adalah sebagai sarana baginya memperoleh dukungan kelompok Islam untuk berkuasa lagi. Perlu diketahui bahwa saat itu banyak para Jenderal aktif maupun Purnawirawan menginginkan pergantian Presiden, bahkan dua Pangab berturut-turut (Benny Moerdani dan Try Sutrisno) pernah secara langsung membicarakan pergantian Presiden kepada Presiden

Soeharto. Dengan insting politik yang tajam, Presiden Soeharto tahu bahwa ia sedikit sekali mendapat dukungan dari kelompok senior ABRI, oleh karena ia mengalihkan simpatinya kepada kelompok Islam untuk mendapatkan dukungan dan dikemudian hari melakukan pembersihan ABRI dari pengaruh para senior ABRI, terutama Benny Moerdani.⁴⁶

Sementara itu ketidaksetujuan terhadap pembentukan ICMI juga datang dari golongan Islam sendiri, yaitu dari golongan Nahdatul Ulama (NU). Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang merupakan pembesar NU waktu itu menolak pembentukan ICMI dengan alasan bahwa ICMI tersebut merupakan suatu kembaran Masyumi, yakni partai modernis pada masa Orde lama yang tidak lain adalah musuh dari NU. Kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto yang sangat loyal terhadap Islam dan kelakuannya yang taat kepada syariat Islam diakhir-akhir masa kekuasaannya memang menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan. Pada saat itu ada masyarakat yang berpendapat bahwa segala perbuatan yang pro Islam tersebut sebagai suatu siasat politik saja namun juga banyak yang berpendapat bahwa perbuatannya itu semata-mata didasarkan kepada taubat kepada Allah mengingat saat itu sang Presiden telah mencapai umur kepala tujuh.

D. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa Presiden

45 Salim Said.

46 Said, *Pemerintahan Otoriter Soeharto*.

Soeharto untuk saat ini masih memegang rekor sebagai Presiden yang menjabat paling lama, yakni sekitar 30 tahun. Sebelum menjabat menjadi Presiden, ia merupakan Jenderal TNI yang sangat berperan penting dalam pemberantasan PKI setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sebagai golongan TNI AD, ia juga salah satu tokoh yang membenci PKI, oleh karenanya, setelah menjabat menjadi Presiden ia membersihkan PKI sampai ke akar-akarnya. Selain itu dalam masa kepemimpinannya sebagai Presiden tersebut ia ditopang ABRI sebagai pendukung utamanya dan menerapkan doktrin Dwi Fungsi. Melalui sebuah rezim yang didominasi oleh tentara tersebut, sangat sedikit memberi ruang kepada kelompok sipil dalam kabinetnya, kecuali pada masa akhir kepemimpinannya. Dengan insting politik yang tajam, Presiden Soeharto meyakini bahwa jika ingin berkuasa lama maka ia harus membuat suatu kebijakan-kebijakan politik, terutama bagi kaum tentara. Ia meyakini bahwa dengan adanya dominasi ABRI dalam Kabinet dan Partai Golkar (dulu Partai Tentara), maka satu-satunya musuh yang dapat menggulingkannya hanyalah dari tentara, bukan dari kalangan sipil. Oleh karena itu ia melakukan kebijakan dengan mengangkat para Jenderal yang dianggapnya tidak memiliki kecakapan dalam memimpin, namun jika suatu saat Jenderal tersebut mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan banyak mengkritisi kebijakannya, maka ia tak segan-segan untuk mencopot jabatannya dan mengasingkan ke tempat

yang jauh dari Kabinet.

Selain itu dengan sikap otoriternya, ia berbuat sesuatu yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tidak membolehkan kritik, pembunuhan terhadap adap anggota demonstran, dan lain-lain. Hal itu semata-mata ia lakukan untuk membungkam seseorang agar kritiknya tidak mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan menimbulkan kerusuhan hingga akhirnya dengan itu ia lengser dari singgasananya. Selain dengan sikap otoriter, ia juga memikat kelompok Islam dengan sikap lembut. Ia banyak melakukan kebijakan-kebijakan islami seperti membolehkan siswi memakai jilbab, membuat Bank Syariah, dan membuat bahkan mendukung penuh ICMI. Banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa simpatinya itu merupakan siasat politik saja untuk keperluan dukungan dalam jabatannya sebagai Presiden yang langgeng tersebut. Itulah kunci-kunci Presiden Soeharto yang diusahakannya, diluar usahanya sebenarnya juga ada alasan lain yang menyebabkan ia berkuasa lama, yakni para anggota MPR masa Orde Lama yang tidak segera mengamandemen UUD 1945 yang mengatur jabatan Presiden itu maksimal hanya dua periode.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. *Pengantar Ilmu Politik*. Disunting oleh Kamilia Sukmawati. 1 ed. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Aprilia, Lilik Eka, Kayan Swastika, dan Sumarjono. "Berakhirnya

- Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998.” *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2014* 1 (2014): 1–9.
- Bukhari, Anuar, dan Muhammad Abudan. “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PM NOMOR : 94-K / PM . III- 12/AD/VI/2015.” *Jurnal Hukum Adigama*, 2015.
- Hardianti;, Dini, Rahayu;, dan Joko Setiono; “Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13.
- Jazimah, Ipong. “MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru.” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3, no. 01 (2013): 9–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.902>.
- “Jokowi Tolak Amandemen Jabatan Presiden 3 Periode.” Diakses 25 September 2019. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/jokowi-tolak-amandemen-jabatan-presiden-3-periode/1661041>.
- Said, Salim. *Dari Gestapu ke Reformasi*. Disunting oleh Opik Lubis. 1 ed. Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2013.
- . *Gestapu 65 PKI Aidit*. Disunting oleh Andreas Kusumahadi. 1 ed. Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015.
- . *Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Disunting oleh Ibnu Maxum. 1 ed. Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2016.
- Wardani, Dharyanto Tito. “Perlawanan Intelektual Pribumi Di Jawa Barat Tahun 1923-1925.” *Patanjala* 8 (2016): 11.

